

## Analisis Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi Desa (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Banjarsari)

Kinanti Prianggara Putri<sup>a</sup>, Resti Septia<sup>b</sup>, Muhammad Algunadi<sup>c</sup>, Piki Maulana<sup>d</sup>  
<sup>a, b, c, d</sup> Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Sangga Buana, Bandung  
<sup>c</sup> aldi.algunadi@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan kelembagaan ekonomi desa dalam mendukung perkembangan usaha mikro di Desa Banjarsari. Kelembagaan ekonomi desa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung kemajuan usaha mikro melalui berbagai aspek, seperti kebijakan, akses modal, pembinaan, dan penguatan jaringan pasar. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen terhadap pelaku usaha mikro serta aparat desa yang terlibat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan kelembagaan di Desa Banjarsari menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, terbatasnya akses informasi bagi pelaku usaha mikro, serta minimnya pelatihan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, ada potensi yang besar untuk memperkuat kelembagaan desa melalui pengoptimalan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama dengan pihak eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam pengelolaan kelembagaan yang lebih inklusif dan transparan, dengan tujuan meningkatkan peran usaha mikro dalam perekonomian desa dan memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.

Kata kunci: Tata Kelola, Kelembagaan Ekonomi Desa, Usaha Mikro, BUMDes, Desa Banjarsari

### Abstract

*This study aims to examine the management of village economic institutions in supporting the development of micro-enterprises in Banjarsari Village. Village economic institutions play a crucial role in creating an ecosystem that supports the growth of micro-enterprises through various aspects, such as policies, access to capital, mentoring, and strengthening market networks. The research method used is a case study with a qualitative approach, which includes interviews, observations, and document analysis of micro-enterprise actors and relevant village officials. The findings reveal that the management of institutions in Banjarsari Village faces several challenges, such as a lack of coordination between related institutions, limited access to information for micro-enterprise actors, and a lack of ongoing training programs. Nevertheless, there is great potential to strengthen village institutions through optimizing the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes), enhancing human resource capacity, and collaborating with external parties. This study recommends improvements in institutional management to be more inclusive and transparent, aiming to increase the role of micro-enterprises in the village economy and ensure long-term sustainability and community welfare.*

*Keywords: Governance, Village Economic Institutions, Micro-Enterprises, BUMDes, Banjarsari Village*

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berbasis desa kini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu elemen kunci dalam pembangunan ekonomi desa adalah penguatan kelembagaan ekonomi desa, yang berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan usaha, terutama usaha mikro. Dengan pemberdayaan desa yang lebih mandiri, diharapkan dapat tercipta lebih banyak peluang kerja baru, meningkatkan pemerataan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Usaha mikro di desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai komponen utama dalam perekonomian lokal, usaha mikro tidak hanya bertindak sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai sumber utama lapangan kerja bagi warga setempat. Berdasarkan data dari (Kinerja, 2023), usaha mikro memberikan kontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah pedesaan. Dengan berkembangnya usaha mikro, banyak peluang kerja baru terbuka, terutama di pedesaan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian yang sering terpengaruh oleh fluktuasi musiman. Keberhasilan usaha mikro juga berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang memperkuat konsumsi domestik serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Kinerja, 2023) menambahkan bahwa pengembangan usaha mikro dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat lokal, mengingat kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, usaha mikro juga memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat desa (Sikki et al., 2024b). Usaha kecil yang dijalankan oleh penduduk setempat memberikan kesempatan bagi warga untuk mengasah keterampilan baru, memperluas pengetahuan, dan membangun jaringan sosial yang lebih kokoh di antara anggota komunitas. Proses ini membantu memperkuat solidaritas sosial, yang sangat penting untuk menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik di tingkat desa. Sebagaimana dijelaskan oleh (Rajan & Panicker, 2020), pengembangan usaha mikro dapat memperkuat modal sosial, yaitu hubungan antar individu yang membangun rasa saling percaya dan kerja sama, yang pada gilirannya memperkuat struktur sosial di desa. Seiring dengan berkembangnya usaha mikro, masyarakat desa juga dapat menjadi lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar, serta meningkatkan kapasitas ekonomi di tingkat lokal.

Namun, meskipun usaha mikro di desa memiliki potensi besar, pengembangannya masih terhalang oleh berbagai hambatan struktural. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses terhadap permodalan. Banyak pelaku usaha mikro yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. World Bank (2021) dalam menyatakan bahwa keterbatasan dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau merupakan salah satu masalah utama bagi usaha mikro di negara berkembang, termasuk Indonesia (Al-Shami et al., 2021). Hal ini diperburuk oleh rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, yang sering kali tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mengelola usaha mereka secara efisien dan profesional. Selain itu, terbatasnya akses pasar juga menjadi kendala bagi usaha mikro untuk berkembang, karena mereka kesulitan untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun regional. Al-Shami et al., (2021) juga mengungkapkan bahwa pelaku usaha mikro seringkali terbatas dalam mengakses pasar yang lebih besar karena terbatasnya jaringan distribusi dan promosi produk.

Faktor-faktor ini sering kali berhubungan dengan pengelolaan kelembagaan ekonomi desa yang belum berfungsi secara maksimal. Kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi, belum sepenuhnya berperan dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga desa, terbatasnya dukungan untuk penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, dan peran lembaga yang belum optimal dalam membuka akses pasar dan permodalan. Kania et al., (2021) menekankan bahwa kelembagaan desa perlu diperkuat untuk menghubungkan usaha mikro dengan pasar yang lebih luas serta mempermudah akses terhadap pembiayaan. Kania et al., (2021) juga menyoroti bahwa kelembagaan yang lebih baik akan memberikan manfaat dalam mengurangi hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, termasuk keterbatasan akses pasar. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola kelembagaan ekonomi desa sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dan mengoptimalkan potensi usaha mikro di desa.

Kelembagaan ekonomi desa, seperti BUMDes, koperasi, kelompok usaha bersama, dan lembaga keuangan mikro, seharusnya menjadi pilar utama dalam mengembangkan perekonomian desa. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk bantuan dan permodalan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas usaha, keterampilan masyarakat, dan memperluas akses pasar produk lokal. Keberhasilan dalam mengelola kelembagaan ekonomi desa sangat tergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen yang ada, baik di tingkat lokal maupun dengan dukungan dari pihak eksternal. Yuniarsih et al., (2022) menekankan bahwa integrasi ini akan menciptakan sinergi yang lebih besar antara usaha mikro dengan pasar yang lebih luas serta akses permodalan yang lebih mudah. Namun, kelembagaan ekonomi desa di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kualitas tata kelola, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga-lembaga tersebut. Masalah-masalah ini menghambat optimalisasi potensi desa dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan. Desa Banjarsari, sebagai salah satu desa dengan potensi ekonomi yang cukup besar melalui usaha mikro di sektor olahan makanan, kerajinan, dan perdagangan kecil, menghadapi tantangan serupa. Walaupun terdapat berbagai usaha mikro yang berkembang di desa ini, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Selain itu, peran kelembagaan ekonomi desa, seperti BUMDes dan kelompok usaha bersama, belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pelaku usaha mikro.

Tantangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari. Tata kelola yang baik melibatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kelembagaan desa. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kelembagaan ekonomi desa dapat berfungsi lebih optimal dalam mengembangkan potensi usaha mikro, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari,

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam mengembangkan usaha mikro melalui dukungan kelembagaan desa. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah desa, pengelola kelembagaan ekonomi desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan ekonomi desa sehingga dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung perkembangan usaha mikro di Desa Banjarsari. Strategi ini meliputi upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat peran BUMDes dalam menyediakan akses permodalan dan pelatihan, serta membangun jaringan pasar yang lebih luas untuk produk lokal. Selain itu, meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha mikro juga merupakan faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. Yuniarsih et al., (2023) menyarankan bahwa pengembangan kapasitas manajerial di tingkat usaha mikro dapat membantu usaha tersebut untuk bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penguatan kelembagaan ekonomi desa tidak hanya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa—seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur—akan terwujud seiring dengan keberhasilan pengembangan usaha mikro. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta membuka peluang ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan antar desa dan meningkatkan daya saing desa dalam perekonomian yang lebih luas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tata kelola kelembagaan ekonomi desa dan perannya dalam pengembangan usaha mikro di Desa Banjarsari. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, kondisi kelembagaan, serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaan ekonomi desa (Rohman, MM., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kelembagaan ekonomi dalam konteks lokal, yang tidak hanya mencakup struktur organisasi, tetapi juga hubungan antara aktor-aktor yang terlibat, seperti pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat (Santoso & Raharjo, 2022). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif berbagai pihak yang terlibat, seperti pemilik usaha, aparat desa, serta masyarakat setempat, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terkait tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan ekonomi desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan dan regulasi desa. Teknik ini

memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan kontekstual, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kelembagaan ekonomi desa di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas tata kelola kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung perkembangan usaha mikro.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kelembagaan Ekonomi Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro**

Kelembagaan ekonomi desa memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Di Desa Banjarsari, berbagai lembaga ekonomi yang mendukung pengembangan usaha mikro antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, dan kelompok usaha bersama. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa dan pengurus BUMDes, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan akses permodalan, mengembangkan kapasitas pelaku usaha mikro, dan memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha mikro secara berkelanjutan dan inklusif.

Namun, meskipun terdapat harapan yang besar terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa peran kelembagaan ekonomi di Desa Banjarsari belum sepenuhnya maksimal. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang mengelola lembaga-lembaga ini. Banyak pengurus BUMDes yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang manajemen usaha, yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan sesuai harapan. Mendrofa, S. A., et al., (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya kapasitas manajerial pada tingkat kelembagaan desa dapat menghambat perkembangan usaha mikro secara signifikan.

Selain itu, sebagian besar pelaku usaha mikro di Desa Banjarsari bergerak di sektor informal, seperti produksi makanan olahan, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil. Mereka umumnya mengandalkan modal pribadi dan menjalankan usaha dengan skala yang relatif kecil, yang membatasi daya saing mereka di pasar yang lebih besar. Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa kelembagaan ekonomi desa belum mampu menyediakan dukungan permodalan yang memadai. Keterbatasan aset yang dimiliki oleh BUMDes dan kurangnya inovasi dalam pengembangan unit usaha membuat BUMDes belum optimal dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Kania et al., (2021), menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi desa perlu memperkuat perannya dalam memberikan dukungan permodalan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan inovasi dalam unit usaha BUMDes. Dengan demikian, kelembagaan

ini dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

### Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi Desa.

Tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari, jika dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip good governance, masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pengembangan ekonomi desa. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi desa masih belum sepenuhnya diterapkan, yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Susilo & Rasyad, 2024). Salah satu indikator utama dari kurangnya transparansi ini adalah terbatasnya sosialisasi mengenai program kerja kelembagaan desa kepada masyarakat, serta tidak tersedianya laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Rosamartina et al., (2022) juga mencatat bahwa keterbukaan dalam pengelolaan informasi masih menjadi masalah yang menghalangi terbentuknya hubungan yang lebih kuat antara lembaga desa dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat desa tidak sepenuhnya memahami fungsi dan peran kelembagaan ekonomi desa. Bahkan, ada persepsi negatif yang berkembang bahwa kelembagaan desa hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kelembagaan ekonomi desa. Partisipasi masyarakat yang minim ini berpotensi menurunkan efektivitas implementasi program, karena banyak kegiatan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Dari sisi efektivitas dan efisiensi, kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari belum mampu menjalankan program pemberdayaan secara optimal. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pengembangan akses pasar masih sangat terbatas. Padahal, berdasarkan hasil observasi, Desa Banjarsari memiliki potensi produk unggulan seperti makanan olahan berbahan dasar lokal dan kerajinan tangan yang berpotensi untuk dipasarkan lebih luas di luar desa. (Sikki et al., 2025) mengemukakan bahwa kelembagaan yang tidak mampu memaksimalkan potensi lokal akan mengalami kesulitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kelembagaan ekonomi desa belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam pengembangan usaha mikro. Di era digital seperti sekarang, pemasaran produk melalui platform online bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Namun, banyak pelaku usaha mikro di Desa Banjarsari yang masih belum terhubung dengan pasar digital, yang pada gilirannya membatasi potensi mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Sari, (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa rendahnya adopsi teknologi digital menjadi salah satu hambatan besar bagi usaha mikro di tingkat lokal, yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar regional dan global. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing usaha mikro di Desa Banjarsari, sangat penting untuk mengembangkan keterampilan digital

dan memanfaatkan platform online sebagai saluran pemasaran yang lebih efektif.

### Faktor Penghambat Optimalisasi Tata Kelola

Beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari antara lain:

- a) Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik pada tingkat pengurus kelembagaan desa maupun pelaku usaha mikro. Banyak pengurus kelembagaan desa yang tidak memiliki keterampilan manajerial yang cukup, sehingga mengakibatkan pengelolaan program yang kurang efisien. Dampaknya juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro yang terbatas aksesnya untuk mengikuti pelatihan atau pendampingan yang dapat membantu mereka mengelola usaha dengan cara yang lebih profesional dan berkelanjutan. Mardikanto (2019) menekankan bahwa meningkatkan kapasitas SDM di tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kelembagaan ekonomi desa.
- b) Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya terlibat dan merasa memiliki terhadap program yang dijalankan oleh kelembagaan desa. Banyak warga desa yang tidak mengetahui atau tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari program tersebut, yang pada gilirannya menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelembagaan desa. mencatat bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program-program kelembagaan (Sikki et al., 2024a).
- c) Rendahnya Transparansi dalam Pengelolaan, terutama pada aspek keuangan dan pengambilan keputusan. Ketidakjelasan dalam laporan keuangan dan keputusan yang diambil secara tertutup dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. Penerapan transparansi dalam pengelolaan kelembagaan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
- d) Kurangnya Inovasi dalam Program dan Diversifikasi Usaha, yang menghalangi kelembagaan desa untuk memberikan dukungan optimal kepada pelaku usaha mikro. Banyak program yang dijalankan masih bersifat tradisional dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan serta perkembangan tren pasar terkini. (Sari, R.D., 2024) menunjukkan bahwa inovasi dalam program kelembagaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan peluang baru dan mendiversifikasi sumber daya yang ada bagi pelaku usaha mikro.

Terbatasnya Akses terhadap Teknologi dan Informasi, yang menghalangi pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan pasar digital secara maksimal. Di era digital yang serba terhubung seperti sekarang, pemasaran produk melalui platform online menjadi sangat penting, namun masih banyak pelaku usaha mikro di Desa Banjarsari yang belum terhubung dengan pasar digital atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkannya. Sari., R.D., & Siahaan, ( 2025) menemukan bahwa rendahnya penggunaan teknologi digital merupakan salah satu kendala utama bagi usaha mikro dalam

meningkatkan daya saing, yang mengakibatkan usaha mereka kesulitan untuk bersaing di pasar global.

### **Peluang Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi Desa.**

Meskipun terdapat berbagai kendala, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2022 mengemukakan bahwa terdapat beberapa peluang tersebut antara lain:

- a) Potensi Produk Lokal yang dapat dikembangkan dan dipasarkan lebih luas, baik di tingkat regional maupun melalui platform digital.
- b) Komitmen Pemerintah Desa yang mulai menyadari pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung usaha mikro.
- c) Dukungan Program Eksternal, seperti pelatihan dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelaku usaha.
- d) Semangat Kewirausahaan di Kalangan Masyarakat, khususnya generasi muda desa yang mulai tertarik untuk mengembangkan usaha sendiri.
- e) Implikasi Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro. Kelembagaan ekonomi desa yang dikelola dengan baik dapat menjadi pilar utama pemberdayaan usaha mikro di Desa Banjarsari. Tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat akan menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran kelembagaan tidak hanya terbatas sebagai penyalur permodalan, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan jejaring usaha mikro.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi desa harus menjadi prioritas jika ingin meningkatkan kontribusi usaha mikro terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan kapasitas pengurus, peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang ada.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari masih belum berjalan optimal dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha bersama, dan koperasi desa memiliki peran penting, namun masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan program. Pelaku usaha mikro di Desa Banjarsari sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi, memiliki keterbatasan dalam hal inovasi produk, dan kesulitan mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun digital. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya program pelatihan, pendampingan, serta dukungan nyata dari kelembagaan ekonomi desa. Meskipun demikian, terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan, seperti keberadaan produk lokal unggulan, semangat kewirausahaan masyarakat, dan adanya peluang kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan lembaga swasta. Tata kelola kelembagaan yang lebih baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem usaha mikro yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Kelembagaan. Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus kelembagaan ekonomi desa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial, keuangan, dan kewirausahaan yang memadai.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kelembagaan. Pengelolaan keuangan, pelaporan program, dan pengambilan keputusan di dalam kelembagaan desa harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kelembagaan ekonomi desa agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penguatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro. Diperlukan lebih banyak program pelatihan, workshop, serta fasilitas akses permodalan dan pemasaran untuk pelaku usaha mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kelembagaan desa harus berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan pasar dan lembaga keuangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Usaha. Pemasaran produk lokal dapat diperluas dengan memanfaatkan platform digital. Oleh karena itu, pelatihan terkait pemasaran online dan digitalisasi usaha perlu menjadi program prioritas kelembagaan ekonomi desa.

Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Kelembagaan ekonomi desa perlu menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat jejaring dan memperoleh dukungan dalam pengembangan usaha mikro.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari dapat berfungsi lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shami, S. A., Mamun, A. A., Rashid, N., & Al-Shami, M. (2021). Microcredit impact on socio-economic development and women empowerment in low-income countries: Evidence from yemen. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/su13169326>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 15(3), 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Kinerja, L. (2023). *laporan kinerja tahun 2023*. 0716.
- Mendrofa, S. A., Sari, M. N., Setyono, B. D. H., Sari, R. D., Gusti, J., Anwar, D. R., ... & Mardatillah, A. (2024). *Bisnis Startup*. (Vol. 1). Mega Press Nusantara. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tCceEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ratna+deli+sari&ots=pSIKX2N\\_uV&sig=\\_NNtiVreGEOEMVIqCM07YL Aqxz0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tCceEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ratna+deli+sari&ots=pSIKX2N_uV&sig=_NNtiVreGEOEMVIqCM07YL Aqxz0)
- Moh.Mujibur Rohman, Janes Sinaga, Yuliawati, Adi Asmara, Titi Purbo Sari, Musa, Abdul Rahman Ramdhan, Via Yustitia, Alamsyah Agit, Suhendi, Nurul Hidayati, Ni Putu Sinta Dewi, Pipin Sukandi, P. S. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Penamuda Media.
- Rajan, S., & Panicker, S. (2020). The concept of entrepreneurial ability-evidence from women in MSMEs of Karnataka state. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 41(1), 1–32. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2020.109429>
- Rosamartina, S., Giustina, S., Domenico, D. F., Pasquale, D. V., & Angeloantonio, R. (2022). Digital reputation and firm performance: The moderating role of firm orientation towards sustainable development goals (SDGs). *Journal of Business Research*, 152(July), 315–325. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.07.025>
- Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2022). Diskursus Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs). *Share : Social Work Journal*, 11(2), 100. <https://doi.org/10.24198/share.v11i2.37076>
- Sari, R. D. Adriansyah, N. ihwani., (2024). Integrating TAM, Trust and Perceived Risk Factors on Emerging-Market Consumers' Attitude Towards Shopping for Muslim Fashion Online. *Sinergi International Journal of Management and Business*, 2(3), 148–158. <https://doi.org/10.61194/ijmb.v2i3.244>
- Sari, R. D., & Siahaan, P. K. (2025). Pemasaran Berkelanjutan pada Usaha Olahraga Biliar : Media Sosial untuk Capai Netralitas Karbon. *TECHNO-SOCIO EKONOMIKA*, 18(April), 106–114. <https://doi.org/10.32897/techno.2025.18.1.4127>
- Sikki, N., Hersusetiyati, Zaelani, P. I., Sari, R. D., & Al, E. (2024a). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Teknologi untuk Pengolahan Kripik Mangga Gedong Gincu di Desa Jembarwangi, Sumedang. *Jurnal Trimas*, 4(2).
- Sikki, N., Hersusetiyati, Zaelani, P. I., Sari, R. D., & Al, E. (2024b). *Utilizing Surplus Gedong Gincu Mangoes As Chips To Improve Family Economies In Jembarwangi Village*. 1(11), 430–441.
- Sikki, N., Sari, R. D., Rachmawati, E., & Rahayu, H. (2025). *Peran Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Olahan Mangga di Desa Jembarwangi , Sumedang Jawa Barat*. 5(3), 236–248.
- Susilo, H., & Rasyad, A. (2024). The Role of the Giri Mulya Learning Community in Empowering Women Through Entrepreneurship Learning. *Journal of Population and Social Studies*, 32, 494–514. <https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.030>
- Yuniarsih, Y., Irawaty, S., Sanusi, N., Hersusetiyati, H., Sikki, N., Sabila, S., Firdaus, R. T. A., & Gunawan, P. K. (2022). Pelatihan Pemasaran Online Bagi Mitra UMKM Kerupuk Melarat Di Desa Belendung Karawang Dalam Meningkatkan Penjualan Produk. *Abdi Masyarakat*, 4(2), 214–218. <https://doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4411>
- Yuniarsih, Y., Sabila, S., Dadi Priadi, M., Cahyati, W., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Sangga Buana, U., Phh Mustofa No, J., Cibeunying Kaler, K., Bandung, K., & Barat, J. (2023). Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif Melalui Pengolahan Limbah Daun Nanas: Studi Kasus pada UKM Alfiber Subang. *Journal on Education*, 06(01), 4535–4542.